

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- A. Suaedy, Alamsyah, M. Subhi, dan Rumadi, *Islam dan Kaum Minoritas : Tantangan Kontemporer*, The Wahid Institute, Jakarta, 2012.
- A.A.G. Peters dan Koesriani, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku III*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
- Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Achmad Roestandi dan Zul Afdi Ardian, *Tata Negara Jilid I*, CV. Armico, Bandung, 1986.
- Al-Khanif, *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Azhary, Taher, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya ada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Bambang, Edy, Herry, Slamet, Tata, Marsum, Chumaidi, Karsidi, Kuat, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2009.
- Bina Pustaka, *Tiga UUD Republik Indonesia – UUD RI 1945 Hasil Amandemen, Konstitusi RIS 1950, UUD Sementara RI 1950*, Graha Pustaka Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Huku Indonesia*, P.T Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- C.S.T Kansil, *Seri : Ujian Negara Cicilan (UNC) Mata Kuliah Keahlian Hukum (MKKH), Latihan Ujian Hukum Tata Negara Untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 1999.
- Claude, P (ed), *Comparative Human Rights*, The John Hopkins University Press, London, 1997.

- Cundori, Tuttur, *Pendidikan Agama Islam*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013.
- Darji, Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- G.S Diponolo, *Ilmu Negara Jilid I*, Balai Pustaka, Jakarta, 1951.
- Hilman, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.
- Iswanto, *Pengantar Ilmu Hukum (P.I.H)*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2009.
- J.A, Denny, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, Inspirasi.co, Jakarta, 2014.
- Jimly, Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005.
- Jimly, Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Jimly, Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Jimly, Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Cet-kelima*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.
- L. J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 Hingga Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Mustafa Kamal Pasha, dkk, *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*, Cipta Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2000.
- Padmo, Wahjono, *Masalah-masalah Aktual Ketatanegaraan*, Yayasan Wisma Djokosutarto, Jakarta, 1991.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2010.

- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, penyunting Floriberta Aning, Media Pressindo, Yogyakarta, 2006.
- Soemitro, *Prinsip-prinsip Dasar UUD 1945*, BP-7 Pusat No. 52, Jakarta, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok sosiologi hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sri Soemantri M, dalam *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*, dihimpun Padmo Wahjono, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD'45 Dalam Paradigma Reformasi Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Tanggok, M. Ihsan, *Jalan Keselamatan Melalui Agama Konghucu*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Tedi Kholiludin, *Kuasa Negara atas Agama; Politik Pengakuan, Diskursus "Agama Resmi" dan Diskriminasi Hak Sipil*, RaSAIL Media Group, Semarang, 2009.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Wolhoff, G.J. *Pengantar Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Timun Mas, Jakarta, 1960.
- Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1959.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. LN Tahun 2006 Nomor 124. TLN Nomor 4674.
- Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penodaan Agama. LN Tahun 1965 Nomor 3. TLN Nomor 2726.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik). LN Tahun 2005 Nomor 119.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, LN Tahun 2007 Nomor 33, TLN Nomor 4700.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. LN Tahun 2014 Nomor 246.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. LN Tahun 1999 Nomor 165. TLN Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. LN Tahun 2011 Nomor 82. TLN Nomor 5234.

Undang-Undang Republik Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen. LN Tahun 1959 Nomor 75.

Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Konstitusi RIS 1949. Keputusan Presiden RIS 31 Djanuari 1950 Nomor 48 (c). LN 50-3.

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional;

Website

Ahmad Yanuana Samantho, *Nama Agama-Agama Asli Nusantara*, 2013, <https://ahmadsamantho.wordpress.com/2013/05/28/nama-agama-agama-asli-nusantara/>, (diakses pada tanggal 3 April 2016).

Elsaonline.com, *Konflik Bernuansa Agama di Jawa Tengah Meningkat*, 2012, <http://indonesia.ucanews.com/2012/09/12/konflik-bernuansa-agama-di-jawa-tengah-meningkat/>, (diakses pada tanggal 6 April 2016).

Fachri Fachrudin, 2016, *Komnas HAM Terima 52 Aduan Pelanggaran Kebebasan Beragama oleh Pemda*, 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/10/22592301/2016>, (diakses pada tanggal 28 Maret 2017).

Jimly, Asshiddiqie, *Ideologi Pancasila, dan Konstitusi*, <http://www.jimly.com/>, (diakses pada tanggal 28 Maret 2017).

Jimly, Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, dikutip dari <http://www.jimly.com/>, (diakses pada tanggal 27 Maret 2017).

Tohari, *Analisa Pengosongan Kolom Agama di dalam Kartu Tanda Penduduk*, 2015, <http://www.hukumpedia.com/twthaha/analisa-pengosongan-kolom-agama-di-dalam-kartu-tanda-penduduk>, diakses pada tanggal 3 April 2016.

Warsa Tarsono, *Tokoh Penghayat Kepercayaan : "Sudah Mati pun Kami Masih Didiskriminasi"*, 2015, <http://www.madinaonline.id/sosok/wawancara/tokoh-penghayat-kepercayaan-sudah-mati-pun-kami-masih-didiskriminasi/>, (diakses pada tanggal 6 Februari 2017).

<https://www.google.com/search?q=ktp+kolom+agama+dikosongkan&client=opera&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjpa36MvSAhXIj5QKHULnAA0QsAQIMQ&biw=1366&bih=631>, (diakses pada tanggal 11 Maret 2017).

Skripsi

Dhief F. Ramdhani, *Dampak Pengakuan Yuridis Negara Terhadap Agama Tertentu Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif HAM*, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, FHUI, 2011.

Artikel

Laporan Kebebasan Beragama Internasional - INDONESIA, IRF-report-jul-dec2011_ID.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)*, 10 Desember 1948, resolusi 217 A (III).

United Nations, General Assembly, Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief, A/RES/36/55, 25 November 1981.

Wahid Institute (2012), *Lampu Merah Kebebasan Beragama : Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia 2011*, Wahid Institute dan Tifa Foundation, Jakarta.

Wahid Institute, *Annual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2009*, Wahid Institute dan Tifa Foundation, Jakarta.

Jurnal

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Jurnal HAM Volume 4 Nomor 1*, Jakarta, 2013.

Sartini, *Studi Komparatif Arti Kebebasan Beragama di Jepang dan di Indonesia, Sebuah Catatan Awal*, *Jurnal Filsafat*, 2005.

Wiratraman, R. Herlambang Permana, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945 : Konsep, Pengaturan, dan Dinamika Implementasi*, *Jurnal Hukum Panta Rei*, Vol. 1, No. 1 Desember 2007, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2007.

Makalah

M. Amin Abdullah, *Kebabasan Beragama atau Berkeyakinan Dalam Perspektif Kemanusiaan Universal, Agama-agama dan Keindonesiaan*, makalah, disampaikan pada Training HAM Lanjutan Untuk Dosen Hukum dan HAM, kerjasama Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia dan Norwegian Centre For Human Right, Yogyakarta: 8-10 Juni 2011.

Siti Musdah Mulia, *Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Era Reformasi*, Makalah disajikan pada Lokakarya Nasional Komnas HAM *Penegakan HAM dalam 10 Tahun Reformasi*, Hotel Borobudur, Jakarta, 8-11 Juli 2008.

Syamsul Arifin, *Diskursus Hak Asasi Manusia Perspektif Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, hlm. 783, makalah disampaikan dalam *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-10*, Banjarmasin, 1-4 November 2010.

Zainal Abidin Bagir, *Tantangan Pengelolaan Keragaman Indonesia*, makalah, disampaikan pada Kuliah Umum “*Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan; Rekonstruksi Politik Keberagaman di Indonesia*” kerjasama Pusham Unimed dan ILRC, Medan, 12 April 2013.

Satya Arinanto, *Indonesia : Democratization of Constitutional and Political Life since the 1992 General Election and the 1993 Plenary Session of the People's Consultative Assembly*, dalam *Asia Pasific Constitutional Yearbook*, 1993.